KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LA.KIP) setiap tahun. Tulisan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab sebagai wujud akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45

Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelakasanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi

Pemerintah (SA.KIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dimana dalam laporan ini mencakup:

a. Perencanaan dan perjanjian kerja, yang merupakan langkah awal untuk pengukuran

kinerja instansi pemerintah;

b. Akuntabilitas Kinerja, yang memuat pengukuran kinerja kegiatan tahun 2018.

Dengan selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LA.KIP) Tahun 2018

Direktorat Prasarana Perhubungan Darat ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban atas berbagai pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah pada tahun-tahun mendatang serta sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Jakarta, Januari 2019

DIREKTUR PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT

Ir. CHANDRA IRAWAN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600429 198903 1 001

BAB V

LAMPIRAN

1. **Perjanjian Kinerja**
2. **Pengukuran Kinerja**
3. **Lain-lain yang dianggap perlu**

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dirertorat Prasarana Perhubungan Darat serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan data realisasi dari masing-masing indikator kinerja diperoleh hasil pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan Pendanaan (realisasi dan efisiensi) dan Keluaran (*Output*) Direktorat Prasarana Perhubngan Darat yang disusun berdasarkan pengelompokan sasaran sebagai berikut :

1. Dalam rangka terwujudnya prasarana transportasi darat yang berkeselamatan 2 (dua) kegiatan dengan capaian kinerja efisiensi anggaran 101,06 % realisasi anggaran 98,94% dan capaian kinerja rata-rata 100%;
2. Dalam rangka terwujudnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat, dilaksanakan 4 (empat) kegiatan dengan capaian kinerja efisiensi anggaran 107,90%, realisasi anggaran 91,14% dan capaian kinerja rata-rata 100%;

Sebagai penutup dari LKIP Dirertorat Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra tahun 2015-2019, yakni merupakan pelaksanaan tahun keempat, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2018 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Dirertorat Prasarana Perhubungan Darat senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju Pemerintahan yang akuntabel.
3. Hambatan-hambatan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan berimplikasi pada pencapaian target sasaran, untuk selanjutnya harus direduksi dengan perencanaan, penjadwalan dan persiapan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

F. USULAN PERBAIKAN

Saran agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem pelaksanaan kegiatan yaitu melalui :

a. Perlunya perencanaan yang lebih matang dan jelas dalam menyusun rencana anggaran, untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang akan terjadi;
b. Perlunya peningkatan koordinasi di dalam internal institusi terkait dengan pelaksanaan dan perubahan rencana anggaran.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Output Kegiatan	Realisasi Anggaran	Efisiesnsi Anggaran
		8	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Lanjutan	100 %	98,80%	101,20%

Tabel 3.5. Pengukuran output kegiatan, realisasi dan efisiensi anggaran

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Output Kegiatan	Realisasi Anggaran	Efisiesnsi Anggaran
I	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat;	1	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal	100 %	83,14%	116,87%
		2	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Peningkatan Pembangunan Terminal	100 %	96,34%	103,66%
		3	Jumlah Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	100 %	88,00%	112,00%
		4	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Baru	0	0	0
		5	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Baru	100 %	92,41%	107,59%
		6	Jumlah Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	100 %	89,54%	110,46%
		7	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Lanjutan	100 %	96,95%	103,05%

Pada indikator ini, hasil kerja (realisasi) 100%, kegiatan terlaksana.

3) Sasaran III (ketiga), dalam rangka Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat dilaksanakan melalui kegiatan:

Tabel 3.4. Analisis Kinerja Sasaran III

No	Uraian	Indikator	Hasil Kerja (Realisasi)
III	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Darat	100%
		Jumlah Monitoring Prasarana Transportasi Darat	100%
		Jumlah Sistem Informasi Prasarana Transportasi Darat	-
		Jumlah Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Darat	100%

Pada indikator ini, hasil kerja (realisasi) 100%, kegiatan terlaksana.

2.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan menggambarkan anggaran yang disediakan untuk Indikator Kinerja Khusus dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Secara umum anggaran digunakan secara efisien, yang digambarkan dari :

a. Pelaksanaan kegiatan (*output*) dapat tercapai sesuai target (≥100%), dan
b. Realisasi anggaran kurang dari 100% atau efisiensi anggaran lebih dari 100%.

Hasil pengukuran output kegiatan dengan realisasi dan efisiensi anggaran tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut

		7	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Lanjutan	100%
		8	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Lanjutan	100%
		9	Jumlah Paket Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan	100%
		10	Jumlah Paket Rehabilitasi/ Peningkatan Dermaga Sungai	100%
		11	Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga Danau	100%
		12	Jumlah Layanan Internal Organisasi	100%

Pada indikator ini, hasil kerja (realisasi) 96,36 %, ada 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain :

a. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Tior Lintas Gorom - Tior - Kesui Tahap IV (Selesai) dikarenakan status lahan belum jelas.

b. Pembangunan Dermaga Sungai Sri Menanti, gagal dilaksanakan karena terkendala pembebasan lahan.

2) Sasaran II (kedua), dalam rangka terwujudnya Prasarana Transportasi Darat yang berkeselamatan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui kegiatan:

Tabel 3.3. Analisis Kinerja Sasaran II

No	Uraian	Indikator	Hasil Kerja (Realisasi)
II	Terwujudnya Prasarana Transportasi Darat yang berkeselamatan;	Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB	-
		Jumlah Lokasi Rehabilitasi / Peningkatan UPPKB	100%
		Jumlah Paket Pembangunan Break Water	-

B. ANALISIS DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

2.1 Analisis Kinerja Kegiatan

Direktorat Prasarana Perhubungan Darat telah melaksanakan Indikator Kinerja dengan baik, dengan capaian kinerja rata-rata 96,8 %.

Rincian analisis pencapaian kinerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat tahun 2018 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagai berikut:

1) Sasaran I (pertama) adalah dalam rangka Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat pada tahun 2018 melalui kegiatan dengan hasil kinerja :

Tabel 3.2. Analisis Kinerja Sasaran I

No	Uraian	Indikator		Hasil Kerja (Realisasi)
I	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat;	1	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal	100%
		2	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Peningkatan Pembangunan Terminal	100%
		3	Jumlah Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	100%
		4	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Baru	0%
		5	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Baru	100%
		6	Jumlah Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	94%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Perhubungan Darat								
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	22. Nilai AKIP Direktorat Jendral Perhubungan Darat	%	90	-	-	-	-	-
		23. Tingkat penyerapan anggaran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi	%	90	92	92	66.031.283.000		92%
		24. Penyelenggaraan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100%	20.582.394.000	20.582.394.000	100%
		25. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan	Bulan	12	12	100%	14.982.334.000	14.982.334.000	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		tipe A							
3	Meningkatnya Jumlah Sarana Transportasi Darat Yang Memenuhi Kriteria Kinerja (SPM) Yang Ditetapkan	15. Jumlah Kabupaten /Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji	Kab/Kota	10					
		16. Prosentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	75	-	-	-	-	-
		17. Prosentase Pemenuhan standar operasional pelabuhan penyebrangan lintas perintis	%	100	-	-	-	-	-
		18. Prosentase kapal penyebrangan pada lintas perintis yang memenuhi SPM	%	100	-	-	-	-	-
4	Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	19. Monitoring dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan transportsai darat	Laporan	1	1	100%	145.000.000	145.000.000	100%
		20. Jumlah dukungan bidang pembinaan dan keselamatan	Bulan	12	12	100%	-	-	-
5	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja SDM di Bidang	21. Jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	5	5	100	-	-	-

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		e Jumlah cermin tikungan	Unit	-	-	-	-	-	-
		f Jumlah marka jalan	M	60.300	60.300	100%	-	-	-
		g Jumlah paku jalan	Unit	3.250	3.250	100%			
		7. Jumlah paket fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	Paket	1	1	100%	1.000.000.000	1.000.000.000	100%
		8. Monitoring dan pengawasan bidang sarana dan prasarana Perhubungan Darat	Laporan	1	1	100%	195.000.000	195.000.000	100%
		9. Monitoring dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bidang perhubungan darat	Laporan	1	1	100%	145.000.000	145.000.000	100%
		10. Pengadaan alat kalibrasi	Paket	1	1	100%	1.500.000.000	1.500.000.000	100%
		11. Pengadaan alat pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	Paket	1	1	100%	248.765.000	248.765.000	100%
		12. Jumlah paket ATCS	Paket	1	1	100%	3.417.420.000	3.417.420.000	100%
		13. Jumlah lokasi rehabilitasi UPPKB	-						
		14. Jumlah lokasi rehabilitasi terminal	-						

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Menguatnya Konektivitas Nasional Melalui Peningkatan Aksesibilitas, Kapasitas Dan Keterpaduan Jaringan Transportasi Darat	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	6	6	100%	2.559.246.000	2.559.246.000	100%
		2. Jumlah paket pembangunan dermaga danau baru	Paket	-	-	-	-	-	-
		3. Jumlah paket pembangunan halte sungai	Paket	6	6	100%	13.281.300.000	13.281.300.000	100%
		4. Monitoring dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	1	1	100%	195.000.000	195.000.000	100%
		5. Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	laporan	1	1	100%	195.000.000	195.000.000	100%
2	Meningkatnya Keselamatan Sektor Transportasi Darat	6. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan Transportasi darat							
		a Jumlah rambu lalu lintas	Unit	1.499	1.499	100%	-	-	-
		b Jumlah lampu penerangan jalan umum solar cell	Unit	124	124	100%	-	-	-
		c Jumlah guardrail type II, terminal end lengkung	Unit	-	-	-	-	-	-
		d Jumlah delinator	Unit	350	350	100%	-	-	-

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 terhadap Target Kinerja Tahun 2018

Selama tahun 2018, realisasi kinerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat secara umum telah berhasil dicapai dengan baik. Hasil realisasi pada Tahun 2018 yaitu sebesar **96.8%**

Hasil capaian ini diperoleh melalui perbandingan antara nilai total realisasi dan target seluruh sasaran program di lingkungan Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2018.

Secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran program dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat

Uraian		Indikator		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
I	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat;	1	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal	Paket	2	2	100%
		2	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Peningkatan Pembangunan Terminal	Paket	6	6	100%
		3	Jumlah Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	Paket	2	2	100%
		4	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Baru	Paket	-	-	-
		5	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Baru	Paket	1	1	100%
		6	Jumlah Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	Paket	17	16	94%
		7	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Lanjutan	Paket	7	7	100%
		8	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Lanjutan	Paket	2	2	100%
		9	Jumlah Paket Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan	Paket	5	5	100%
		10	Jumlah Paket Rehabilitasi/ Peningkatan Dermaga Sungai	Paket	2	2	100%

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

3.1.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja tahun berjalan akan menjadi lebih efektif jika dilakukan tiap bulan atau triwulan, dengan demikian informasi yang disampaikan adalah informasi yang terbaru mengenai hasil realisasi kinerja dari setiap IKU organisasi dapat diperoleh dengan lebih mudah. Dengan kata lain semakin sering dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap IKU akan diperoleh informasi lebih awal terkait capaian dan selanjutnya akan dilakukan tindakan yang nyata dalam rangka peningkatan kinerja yang akan dipertanggungjawabkan setelah tahun anggaran berakhir.

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Rumus yang digunakan dalam pengukuran dan perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

1) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Capaian\ Kinerja = \left(\frac{Realisasi}{Target\ PK}\right) x\ 100\ \%$$

2) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Capaan\ Kinerja = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target}\ x\ 100\ \%$$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah :

a) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 terhadap target kinerja tahun 2018;
b) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 terhadap target kinerja pada dokumen Renstra Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Tahun 201 Direktorat Prasarana Perhubungan Darat ;
c) Analisis penyebab ketercapaian/ketidaktercapaian kinerja;
d) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

Penjelasan tahapan-tahapan di atas disajikan secara rinci sebagai berikut:

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana stategis yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

3.1 Capaian Kinerja

Tingkat capaian kinerja Unit Kerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran Kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menginventarisir, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi/organisasi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan. Hasil pengukuran kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja selanjutnya disebut pencapaian kinerja.

Capaian kinerja Sasaran Program (SP) unit kerja **AKUNTABILITAS KINERJA** dicapai melalui :

a. Identifikasi IKU pada setiap SP, dimana setiap SP minimal memiliki satu IKU;
b. Setiap IKU dilakukan pengukuran capaian kinerjanya (dalam %) melalui pembandingan realisasi dengan targetnya; dan
c. Nilai capaian kinerja setiap IKU dihitung berdasarkan capaian kinerja setiap kelompok kegiatan yang telah dilakukan guna mencapai SP dimaksud.

Tingkat capaian kinerja setiap SP merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok IKU yang menunjukkan kinerja SP dimaksud, sama halnya dengan nilai/tingkat capaian kinerja suatu IKU merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok kegiatan yang mendukung IKU dimaksud.
Pada dokumen Laporan Kinerja Tahun 2018 ini tidak hanya menampilkan capaian kinerja pada tahun 2018, dengan tetap mengacu pada Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 Tentang

15. Pembangunan Dermaga Sungai Karang Baru-Sumsel Tahap III (selesai)
16. Pembangunan Dermaga Sungai RMP di Sungai Katingan (Selesai)
17. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Beau Tokalimbo di Danau Towuti-Tahap VI
18. Pembangunan Dermaga dan Landing Area di Serpis Waduk Jatiluhur (Tahap II)
19. Pembangunan Dermaga Sungai Petanak di Sungai Kahayan (Selesai)
20. Peningkatan dan Rehab Dermaga Sungai di Danau Mare (Selesai)
21. Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Ajibata
22. Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Tiga Ras
23. Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Simanindo
24. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit (Lintas Pecah Buyung - Alai) - Tahap I
25. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Raijua di Pulau Raijua Kabupaten Sabu Raijua - Tahap I
26. Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (Ro Ro) di Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Lintas Sibolga - Gunungsitoli - Tahap IV
27. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pecah Buyung -Tahap IV
28. Pembangunan Pelabuhan a Penyeberangan Sintete - Tahap IV (Selesai)
29. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sebuku Kab Kotabaru - Tahap V
30. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pure - Tahap IV (Selesai)
31. Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Bombana Lintas Bombana - Tj. Phising Tahap III (Selesai)
32. Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Raha Tahap I
33. Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Sikeli (Tj. Phising) Tahap IV (Selesai)
34. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso - Tahap II
35. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Miangas - Tahap IV (Selesai)
36. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kesui Lintas Gorom - Tior - Kesui Tahap IV (Selesai)
37. Pemb. Pelabuhan Penyeberangan Tior Lintas Gorom - Tior - Kesui Tahap IV (Selesai)
38. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Moti - Tahap III (Selesai)
39. Pembangunan Pelabuhan Penyeb Folley (Pulau Missol) Lintas Wahai - Waigama -Folley - Sorong Tahap VI (Selesai)
40. Pembangunan Pelabuhan Penyeb Wasior Tahap III
41. Pembangunan Pelabuhan Penyeb Matak (Kep. Anambas) Lintas Tanjung Uban - Matak (Selesai)
42. Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Tahap II (Selesai)
43. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bahaur (Fasilitas Pelengkap) (Selesai)
44. Peningkatan Pelabuhan UPT Penyeberangan Kalabahi
45. Peningkatan Pelabuhan UPT Penyeberangan Kariangau (Selesai)
46. Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Pamatata
47. Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Bira (Selesai)
48. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit (Lintas Pecah Buyung - Alai) - Tahap I
49. Penyusunan UKL dan UPL Kantor OPP Merak
50. Penyusunan DED Kantor dan Mess OPP Pagimana
51. Penyusunan UKL UPL dan Analisa Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gedung Kantor OPP Lembar

60. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sunyat-Tahap IV (Selesai)
61. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike-Tahap IV (Selesai)
62. Pembangunan Dermaga Sungai Durian Tahap III Kab. Sintang (Selesai)
63. Pembangunan Dermaga Sungai Batu Dinding Kab. Mahakam Hulu (Selesai)
64. Pembangunan Dermaga Sungai Karang Baru-Sumsel Tahap III (selesai)
65. Pembangunan Dermaga Sungai RMP di Sungai Katingan (Selesai)
66. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Beau Tokalimbo di Danau Towuti-Tahap VI
67. Pembangunan Dermaga dan Landing Area di Serpis Waduk Jatiluhur (Tahap II)
68. Pembangunan Dermaga Sungai Petanak di Sungai Kahayan (Selesai)
69. Peningkatan dan Rehab Dermaga Sungai di Danau Mare (Selesai)
70. Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Ajibata

Kegiatan Non Kontraktual:

1. Monitoring Pelabuhan dalam Rangka Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2017 Subdit Pelabuhan Penyeberangan
2. Monitoring Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
3. Monitoring Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan
4. Pembahasan Penyusunan RKA-KL Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Subdit Pelabuhan Penyeberangan
5. Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI (dalam masa reses) Subdit Pelabuhan Penyeberangan
6. Kunjungan Kerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat
7. Penelisikan (pisami) Prasarana Perhubungan Darat
8. Koordinasi Kelembagaan dan Kerjasama Luar Negeri
9. Koordinasi dan Kelembagaan Dalam Negeri
10. Kontingensi Penanganan Bencana Alam dan Dukungan Kunjungan Pimpinan
11. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Prasarana Perhubungan Darat
12. Layanan Perkantoran
13. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
14. Transport Rapat dalam Kota
15. Rapat Lembur dalam Kantor

Kegiatan pada Satker Hubdat Provinsi

1. Pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong
2. Pembangunan Terminal Transit Penumpang Entikong
3. Pembangunan Terminal Liwas Kota Manado tahap VI
4. Pembangunan Terminal Buroko tahap V
5. Pembangunan Terminal Tangkoko tahap III
6. Rehabilitasi UPPKB Sarang (Kab.Rembang)
7. Rehabilitasi UPPKB Way Urang (Kab. Lampung Selatan)
8. Pembangunan Dermaga Sungai Sri Menanti
9. Pembangunan Dermaga Ambarita di KSPN Danau Toba
10. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Jangkang Dua-Tahap V (Selesai)
11. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sunyat-Tahap IV (Selesai)
12. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike-Tahap IV (Selesai)
13. Pembangunan Dermaga Sungai Durian Tahap III Kab. Sintang (Selesai)
14. Pembangunan Dermaga Sungai Batu Dinding Kab. Mahakam Hulu (Selesai)

60. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sunyat-Tahap IV (Selesai)
61. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike-Tahap IV (Selesai)
62. Pembangunan Dermaga Sungai Durian Tahap III Kab. Sintang (Selesai)
63. Pembangunan Dermaga Sungai Batu Dinding Kab. Mahakam Hulu (Selesai)
64. Pembangunan Dermaga Sungai Karang Baru-Sumsel Tahap III (selesai)
65. Pembangunan Dermaga Sungai RMP di Sungai Katingan (Selesai)
66. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Beau Tokalimbo di Danau Towuti-Tahap VI
67. Pembangunan Dermaga dan Landing Area di Serpis Waduk Jatiluhur (Tahap II)
68. Pembangunan Dermaga Sungai Petanak di Sungai Kahayan (Selesai)
69. Peningkatan dan Rehab Dermaga Sungai di Danau Mare (Selesai)
70. Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Ajibata

Kegiatan Non Kontraktual:

1. Monitoring Pelabuhan dalam Rangka Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2017 Subdit Pelabuhan Penyeberangan
2. Monitoring Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
3. Monitoring Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan
4. Pembahasan Penyusunan RKA-KL Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Subdit Pelabuhan Penyeberangan
5. Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI (dalam masa reses) Subdit Pelabuhan Penyeberangan
6. Kunjungan Kerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat
7. Penelisikan (pisami) Prasarana Perhubungan Darat
8. Koordinasi Kelembagaan dan Kerjasama Luar Negeri
9. Koordinasi dan Kelembagaan Dalam Negeri
10. Kontingensi Penanganan Bencana Alam dan Dukungan Kunjungan Pimpinan
11. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Prasarana Perhubungan Darat
12. Layanan Perkantoran
13. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
14. Transport Rapat dalam Kota
15. Rapat Lembur dalam Kantor

Kegiatan pada Satker Hubdat Provinsi

1. Pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong
2. Pembangunan Terminal Transit Penumpang Entikong
3. Pembangunan Terminal Liwas Kota Manado tahap VI
4. Pembangunan Terminal Buroko tahap V
5. Pembangunan Terminal Tangkoko tahap III
6. Rehabilitasi UPPKB Sarang (Kab.Rembang)
7. Rehabilitasi UPPKB Way Urang (Kab. Lampung Selatan)
8. Pembangunan Dermaga Sungai Sri Menanti
9. Pembangunan Dermaga Ambarita di KSPN Danau Toba
10. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Jangkang Dua-Tahap V (Selesai)
11. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sunyat-Tahap IV (Selesai)
12. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike-Tahap IV (Selesai)
13. Pembangunan Dermaga Sungai Durian Tahap III Kab. Sintang (Selesai)
14. Pembangunan Dermaga Sungai Batu Dinding Kab. Mahakam Hulu (Selesai)

21. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Terminal Transit Penumpang Entikong
22. Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Transit Penumpang Entikong
23. Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Barang Internasional Entikong
24. Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Barang Internasional Nanga Badau
25. Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Barang Internasional Skouw, Jayapura
26. Penyusunan Buku Profil Terminal Penumpang Tipe A Indonesia
27. Penyusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Ajibata Pada Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Sumatera Utara;
28. Penyusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Ambarita Pada Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Sumatera Utara;
29. Penyusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Simanindo Pada Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Sumatera Utara;
30. Penyusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Tigaras Pada Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Sumatera Utara;
31. Penyusunan Dokumen Lingkungan Peningkatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
32. Penyusunan Dokumen Lingkungan Peningkatan Pelabuhan Tigaras dan Simanindo Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
33. Penyusunan SID dan RIP Pembangunan Pelabuhan Sungai Ringin di Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
34. Penyusunan DED Pembangunan Dermaga Sungai Klamono Kabupaten Sorong.
35. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Kinerja Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau.
36. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
37. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Hubdat
38. FS, Masterplan dan DED Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo (Lintas Teluk Dalam - Pulau Telo);
39. FS, Masterplan dan DED Pelabuhan Penyeberangan Dolong , di P.Waleakod, Kab Tojo Unauna Prov Sulteng (Lintas Dolong - Ampana/ Marisa);
40. FS, Masterplan dan DED Pelabuhan Penyeberangan Boniton di Pulau Peleng Kab Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (Lintas Boniton P.Peleng - Banggai P.Banggai);
41. Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Marisa di Provinsi Gorontalo dan Wakai di Provinsi Sulawesi Tengah;
42. Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Sermata Provinsi Maluku;
43. Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Letung di Pulau Jemaja;
44. Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Serasan di Provinsi Kepulauan Riau;
45. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan;
46. Penyusunan Pedoman Teknis Rancang Bangun Pelabuhan Penyeberangan.
47. Jumlah anggaran kegiatan Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat
48. Kegiatan Satker Provinsi dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan
49. Kegiatan
50. Pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong
51. Pembangunan Terminal Transit Penumpang Entikong
52. Pembangunan Terminal Liwas Kota Manado tahap VI
53. Pembangunan Terminal Buroko tahap V
54. Pembangunan Terminal Tangkoko tahap III
55. Rehabilitasi UPPKB Sarang (Kab.Rembang)
56. Rehabilitasi UPPKB Way Urang (Kab. Lampung Selatan)
57. Pembangunan Dermaga Sungai Sri Menanti
58. Pembangunan Dermaga Ambarita di KSPN Danau Toba
59. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Jangkang Dua-Tahap V (Selesai)

D. PROGRAM DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan Direktorat Prasarana Perhubungan Darat yang telah ditetapkan, maka disusunlah program yang merupakan suatu kegiatan pokok yang menjadi dasar untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang direncanakan sebagai turunan dari kebijakan Direktorat Prasarana Perhubungan Darat. Adapun program-program tersebut antara lain:

a. Pembangunan dan rehabilitasi Terminal;
b. Pembangunan dan rehabilitasi UPPKB;
c. Pembangunan dan rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan;
d. Pembangunan dan rehabilitasi Pelabuhan Sungai dan Danau;
e. Pembangunan dan peningkatan Bimbingan Kepengusahaan;
f. Penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) di bidang Prasarana Perhubungan Darat.

E. KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT

Untuk mencapai program yang telah ditetapkan maka disusun berbagai kegiatan Direktorat Prasarana Perhubungan Darat tahun 2017, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang ditampung pada DIPA Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat maupun yang ditampung pada DIPA Satker Hubdat di beberapa Provinsi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan pada Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat

Kegiatan kontraktual :

1. Monitoring Perbaikan Pelayanan dan Ketertiban Terminal Penumpang
2. Pembangunan Terminal Tidar Magelang tahap I
3. Perbaikan Pelayanan dan Ketertiban Terminal Penumpang Tipe A tahap III termasuk sepervisi
4. Pengadaan Fasilitas Keamanan (checking point/ metal detector/ CCTV) Terminal Penumpang Tipe A
5. Pengadaaan Peralatan Penunjang Energi Mandiri di Terminal Penumpang Tipe A
6. Peningkatan/Rehabilitasi UPPKB (25 lokasi)
7. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja UPPKB
8. Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor
9. Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi UPPKB di Pulau Jawa Tahap I
10. Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi UPPKB di Pulau Kalimantan
11. Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi UPPKB di Pulau Sulawesi
12. Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi UPPKB di Pulau Sumatera Tahap I
13. Penyusunan Rencana Induk dan DED Terminal Penumpang Tipe A
14. In House Consultant Bidang Terminal Angkutan Jalan (P3D, Perumusan NSPK, Olah Data Terminal)
15. Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Internasional Aruk, Sambas
16. Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Internasional Motaain
17. Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Internasional Motamasin, Kab. Malaka
18. Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Internasional Wini Kab. TTU
19. Penyusunan DED Perbaikan Pelayanan dan Ketertiban Terminal Penumpang Tipe A Tahap III
20. Penyusunan Rencana Induk Terminal dan SID Terminal Penumpang Entikong

47.	Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Pamatata	Rp.	6.140.120.000
48.	Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Bira (Selesai)	Rp.	12.167.456.000
49.	Penyusunan UKL dan UPL Kantor OPP Merak	Rp.	500.400.000
50.	Penyusunan DED Kantor dan Mess OPP Pagimana	Rp.	616.800.000
51.	Penyusunan UKL UPL dan Analisa Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gedung Kantor OPP Lembar	Rp.	606.700.000
	Jumlah anggaran kegiatan Satker Hubdat Provinsi	**Rp.**	**842.845.382.000**
	Jumlah Keseluruhan	**Rp.**	**980.726.141.000**

27.	Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (Ro Ro) di Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Lintas Sibolga - Gunungsitoli - Tahap IV	Rp.	25.680.393.000
28.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pecah Buyung -Tahap IV	Rp.	9.397.835.000
29.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sintete - Tahap IV (Selesai)	Rp.	21.104.600.000
30.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sebuku Kab Kotabaru - Tahap V	Rp.	44.167.434.000
31.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pure - Tahap IV (Selesai)	Rp.	45.851.701.000
32.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bombana Lintas Bombana - Tj. Phising Tahap III (Selesai)	Rp.	42.501.119.000
33.	Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Raha Tahap I	Rp.	47.300.000.000
34.	Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Sikeli (Tj. Phising) Tahap IV (Selesai)	Rp.	26.539.109.000
35.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso - Tahap II	Rp.	48.894.200.000
36.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Miangas - Tahap IV (Selesai)	Rp.	30.521.198.000
37.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kesui Lintas Gorom - Tior - Kesui Tahap IV (Selesai)	Rp.	8.435.000.000
38.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tior Lintas Gorom - Tior - Kesui Tahap IV (Selesai)	Rp.	10.955.300.000
39.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Moti - Tahap III (Selesai)	Rp.	19.377.146.000
40.	Pembangunan Pelabuhan Penyeb Folley (Pulau Missol) Lintas Wahai - Waigama -Folley - Sorong Tahap VI (Selesai)	Rp.	40.859.642.000
41.	Pembangunan Pelabuhan Penyeb Wasior Tahap III	Rp.	38.243.795.000
42.	Pembangunan Pelabuhan Penyeb Matak (Kep. Anambas) Lintas Tanjung Uban - Matak (Selesai)	Rp.	9.000.000.000
43.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bahaur (Fasilitas Pelengkap) (Selesai);	Rp.	5.273.444.000
44.	Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Tahap II (Selesai);	Rp.	4.527.600.000
45.	Peningkatan Pelabuhan UPT Penyeberangan Kalabahi;	Rp.	22.689.722.000
46.	Peningkatan Pelabuhan UPT Penyeberangan Kariangau (Selesai);	Rp.	2.351.200.000

7.	Rehabilitasi UPPKB Way Urang (Kab. Lampung Selatan)	Rp.	12.610.156.000
8.	Pembangunan Dermaga Sungai Sri Menanti	Rp.	7.000.000.000
9.	Pembangunan Dermaga Ambarita di KSPN Danau Toba	Rp.	10.000.000.000
10.	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Jangkang Dua-Tahap V (Selesai)	Rp.	17.265.300.000
11.	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sunyat-Tahap IV (Selesai)	Rp.	2.678.220.000
12.	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike-Tahap IV (Selesai)	Rp.	3.484.080.000
13.	Pembangunan Dermaga Sungai Durian Tahap III Kab. Sintang (Selesai)	Rp.	19.000.400.000
14.	Pembangunan Dermaga Sungai Batu Dinding Kab. Mahakam Hulu (Selesai)	Rp.	13.500.000.000
15.	Pembangunan Dermaga Sungai Karang Baru-Sumsel Tahap III (selesai)	Rp.	5.000.000.000
16.	Pembangunan Dermaga Sungai RMP di Sungai Katingan (Selesai)	Rp.	14.600.000.000
17.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Beau Tokalimbo di Danau Towuti-Tahap VI	Rp.	14.219.582.000
18.	Pembangunan Dermaga dan Landing Area di Serpis Waduk Jatiluhur (Tahap II)	Rp.	4.320.000.000
19.	Pembangunan Dermaga Sungai Petanak di Sungai Kahayan (Selesai)	Rp.	10.000.000.000
20.	Peningkatan dan Rehab Dermaga Sungai di Danau Mare (Selesai)	Rp.	3.886.108.000
21.	Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Ajibata	Rp.	12.177.211.000
22.	Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Tiga Ras	Rp.	10.000.000.000
23.	Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Simanindo	Rp.	10.000.000.000
24.	Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Danau Lindu	Rp.	5.000.000.000
25.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit (Lintas Pecah Buyung - Alai) - Tahap I	Rp.	7.234.537.000
26.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Raijua di Pulau Raijua Kabupaten Sabu Raijua - Tahap I	Rp.	22.172.460.000

40.	Kunjungan Kerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Rp.	200,000,000
41.	Penelisikan (pisami) Prasarana Perhubungan Darat	Rp.	1,000,000,000
42.	Koordinasi Kelembagaan dan Kerjasama Luar Negeri	Rp.	100,000,000
43.	Koordinasi dan Kelembagaan Dalam Negeri	Rp.	200,000,000
44.	Kontingensi Penanganan Bencana Alam dan Dukungan Kunjungan Pimpinan	Rp.	500,000,000
45.	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Prasarana Perhubungan Darat	Rp.	500,000,000
46.	Layanan Perkantoran	Rp.	2,642,880,000
47.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp.	130,000,000
48.	Transport Rapat dalam Kota	Rp.	50,000,000
49.	Rapat Lembur dalam Kantor	Rp.	500,000,000
	Jumlah anggaran kegiatan Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	**Rp.**	**137.880.759.000**
	Kegiatan Satker Provinsi dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan		
	Kegiatan	**Anggaran**	
1.	Pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong	Rp.	60.000.000.000
2.	Pembangunan Terminal Transit Penumpang Entikong	Rp.	10.000.000.000
3.	Pembangunan Terminal Liwas Kota Manado tahap VI	Rp.	12.950.000.000
4.	Pembangunan Terminal Buroko tahap V	Rp.	15.172.500.000
5.	Pembangunan Terminal Tangkoko tahap III	Rp.	10.500.000.000
6.	Rehabilitasi UPPKB Sarang (Kab.Rembang)	Rp.	6.368.914.000

22.	Penyusunan DED Pembangunan Dermaga Sungai Klamono Kabupaten Sorong.	Rp.	750,000,000
23.	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Kinerja Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau.	Rp.	500,000,000
24.	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp.	500,000,000
25.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Hubdat	Rp.	750,000,000
26.	FS, Masterplan dan DED Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo (Lintas Teluk Dalam - Pulau Telo);	Rp.	1,300,000,000
27.	FS, Masterplan dan DED Pelabuhan Penyeberangan Dolong , di P.Waleakod, Kab Tojo Unauna Prov Sulteng (Lintas Dolong - Ampana/ Marisa);	Rp.	1,300,000,000
28.	FS, Masterplan dan DED Pelabuhan Penyeberangan Boniton di Pulau Peleng Kab Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (Lintas Boniton P.Peleng - Banggai P.Banggai);	Rp.	1,300,000,000
29.	Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Marisa di Provinsi Gorontalo dan Wakai di Provinsi Sulawesi Tengah;	Rp.	1,150,000,000
30.	Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Sermata Provinsi Maluku;	Rp.	1,000,000,000
31.	Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Letung di Pulau Jemaja;	Rp.	1,000,000,000
32.	Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Serasan di Provinsi Kepulauan Riau;	Rp.	1,000,000,000
33.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan;	Rp.	1,000,000,000
34.	Penyusunan Pedoman Teknis Rancang Bangun Pelabuhan Penyeberangan.	Rp.	1,000,000,000
35.	Monitoring Pelabuhan dalam Rangka Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2017 Subdit Pelabuhan Penyeberangan	Rp.	142,750,000
36.	Monitoring Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Rp.	500,000,000
37.	Monitoring Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	Rp.	500,000,000
38.	Pembahasan Penyusunan RKA-KL Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Subdit Pelabuhan Penyeberangan	Rp.	188,137,000
39.	Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI (dalam masa reses) Subdit Pelabuhan Penyeberangan	Rp.	266,290,000

17.	Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Internasional Motamasin, Kab. Malaka	Rp.	1,000,000,000
18.	Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Internasional Wini Kab. TTU	Rp.	1,000,000,000
19.	Penyusunan DED Perbaikan Pelayanan dan Ketertiban Terminal Penumpang Tipe A Tahap III	Rp.	1,800,000,000
20.	Penyusunan Rencana Induk Terminal dan SID Terminal Penumpang Entikong	Rp.	1,000,000,000
21.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Terminal Transit Penumpang Entikong	Rp.	900,000,000
22.	Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Transit Penumpang Entikong	Rp.	650,000,000
23.	Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Barang Internasional Entikong	Rp.	650,000,000
24.	Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Barang Internasional Nanga Badau	Rp.	650,000,000
13.	Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Barang Internasional Skouw, Jayapura	Rp.	650,000,000
14.	Penyusunan Buku Profil Terminal Penumpang Tipe A Indonesia	Rp.	200,000,000
15.	Penyusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Ajibata Pada Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Sumatera Utara;	Rp.	990,000,000
16.	Penyusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Ambarita Pada Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Sumatera Utara;	Rp.	990,000,000
17.	Penyusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Simanindo Pada Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Sumatera Utara;	Rp.	990,000,000
18.	Penyusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Tigaras Pada Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Sumatera Utara;	Rp.	990,000,000
19.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Peningkatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;	Rp.	980,000,000
20.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Peningkatan Pelabuhan Tigaras dan Simanindo Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;	Rp.	980,000,000
21.	Penyusunan SID dan RIP Pembangunan Pelabuhan Sungai Ringin di Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat;	Rp.	990,000,000

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2017

Kegiatan Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat			
Kegiatan		**Pagu Anggaran**	
1.	Monitoring Perbaikan Pelayanan dan Ketertiban Terminal Penumpang	Rp.	500,000,000
2.	Pembangunan Terminal Tidar Magelang tahap I	Rp.	7,000,000,000
3.	Perbaikan Pelayanan dan Ketertiban Terminal Penumpang Tipe A tahap III termasuk sepervisi	Rp.	37,262,789,000
4.	Pengadaan Fasilitas Keamanan (checking point/ metal detector/ CCTV) Terminal Penumpang Tipe A	Rp.	10,000,000,000
5.	Pengadaaan Peralatan Penunjang Energi Mandiri di Terminal Penumpang Tipe A	Rp.	15,000,000,000
6.	Peningkatan/Rehabilitasi UPPKB (25 lokasi)	Rp.	21,631,163,000
7.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja UPPKB	Rp.	500,000,000
8.	Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor	Rp.	689,400,000
9.	Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi UPPKB di Pulau Jawa Tahap I	Rp.	854,000,000
10.	Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi UPPKB di Pulau Kalimantan	Rp.	886,000,000
11.	Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi UPPKB di Pulau Sulawesi	Rp.	880,000,000
12.	Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi UPPKB di Pulau Sumatera Tahap I	Rp.	872,350,000
13.	Penyusunan Rencana Induk dan DED Terminal Penumpang Tipe A	Rp.	2,000,000,000
14.	In House Consultant Bidang Terminal Angkutan Jalan (P3D, Perumusan NSPK, Olah Data Terminal)	Rp.	1,000,000,000
15.	Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Internasional Aruk, Sambas	Rp.	1,000,000,000
16.	Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Internasional Motaain	Rp.	1,000,000,000

3. **Kegiatan**
   Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

4. **Indikator Kinerja Kegiatan**
   Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Perhubungan Darat yang menjadi tanggung jawab Direktorat Prasarana Perhubungan Darat.

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan dalam kelompok :

a. Masukan ***(Inputs)*** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
b. Keluaran ***(Outputs)*** adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
c. Hasil ***(Outcomes)*** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah outcomes merupan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
d. Manfaat ***(benefit)*** adalah kegunaan suatu keluaran ***(outputs)*** yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
e. Dampak ***(impacts)***adalah ukuran tingkat pengaruh soaial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus terorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya :

a. Spesifik dan jelas;
b. Dapat diukur secara obyektif;
c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			Kunjungan Pimpinan		
		3.c.	Jumlah Sistem Informasi Prasarana Transportasi Darat:	Paket	0
		3.d.	Jumlah Bimbingan Teknis dan Sosialiasasi Bidang Prasarana Transportasi Darat: 1. Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor 2. Pembahasan Penyusunan RKA-KL Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Subdit Pelabuhan Penyeberangan 3. Penyusunan Laporan Kinerja dan Program Prasarana Perhubungan Darat Subag Tata Usaha 4. Peningkatan Kapasitas SDM Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan	4

B. PENETAPAN KINERJA (PK) DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018

Dokumen penetapan kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/dinas lain.

Adapun komponen penetapan kinerja meliputi :

1. **Sasaran**
   Sasaran yang yang dimaksud pada penetapan kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. **Program**
   Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi.

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			31. Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Sermata Provinsi Maluku; 32. Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Letung di Pulau Jemaja; 33. Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Serasan di Provinsi Kepulauan Riau 34. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan; 35. Penyusunan Pedoman Teknis Rancang Bangun Pelabuhan Penyeberangan. 36. Penyusunan UKL dan UPL Kantor OPP Merak 37. Penyusunan DED Kantor dan Mess OPP Pagimana 38. Penyusunan UKL UPL dan Analisa Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gedung Kantor OPP Lembar		
		3.b.	Jumlah Monitoring Prasarana Transportasi Darat: 1. Monitoring Perbaikan Pelayanan dan Ketertiban Terminal Penumpang 2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja UPPKB 3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Kinerja Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau 4. Pemantauan Pelabuhan dalam Rangka Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2017 Subdit Pelabuhan Penyeberangan 5. Monitoring Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan 6. Monitoring Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan 7. Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI (dalam masa reses) Subdit Pelabuhan Penyeberangan 8. Penelisikan (pisami) Prasarana Perhubungan Darat 9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Hubdat 10. Koordinasi Kelembagaan dan Kerjasama Luar Negeri 11. Koordinasi dan Kelembagaan Dalam Negeri 12. Kontingensi Penanganan Bencana Alam dan Dukungan	Kegiatan	12

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
		Pelabuhan Ajibata Pada Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Sumatera Utara; 20. Penyusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Ambarita Pada Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Sumatera Utara; 21. Penyusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Simanindo Pada Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Sumatera Utara; 22. Penyusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Tigaras Pada Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Sumatera Utara; 23. Penyusunan Dokumen Lingkungan Peningkatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; 24. Penyusunan Dokumen Lingkungan Peningkatan Pelabuhan Tigaras dan Simanindo Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; 25. Penyusunan SID dan RIP Pembangunan Pelabuhan Sungai Ringin di Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat; 26. Penyusunan DED Pembangunan Dermaga Sungai Klamono Kabupaten Sorong 27. FS, Masterplan dan DED Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo (Lintas Teluk Dalam - Pulau Telo); 28. FS, Masterplan dan DED Pelabuhan Penyeberangan Dolong , di P.Waleakod, Kab Tojo Unauna Prov Sulteng (Lintas Dolong - Ampana/ Marisa); 29. FS, Masterplan dan DED Pelabuhan Penyeberangan Boniton di Pulau Peleng Kab Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (Lintas Boniton P.Peleng - Banggai P.Banggai); 30. Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Marisa di Provinsi Gorontalo dan Wakai di Provinsi Sulawesi Tengah;		

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
		(P3D, Perumusan NSPK, Olah Data Terminal) 3. Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Internasional Aruk, Sambas 4. Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Internasional Motaain 5. Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Internasional Motamasin, Kab. Malaka 6. Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Internasional Wini Kab. TTU 7. Penyusunan DED Perbaikan Pelayanan dan Ketertiban Terminal Penumpang Tipe A Tahap III 8. Penyusunan Rencana Induk Terminal dan SID Terminal Penumpang Entikong 9. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Terminal Transit Penumpang Entikong 10. Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Transit Penumpang Entikong 11. Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Barang Internasional Entikong 12. Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Barang Internasional Nanga Badau 13. Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Barang Internasional Skouw, Jayapura 14. Penyusunan Buku Profil Terminal Penumpang Tipe A Indonesia 15. Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi UPPKB di Pulau Jawa Tahap I 16. Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi UPPKB di Pulau Kalimantan 17. Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi UPPKB di Pulau Sulawesi 18. Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi UPPKB di Pulau Sumatera Tahap I 19. Penyusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan		

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			(Selesai).		
		1.k	Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga Danau : 1. Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Ajibata; 2. Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Tiga Ras; 3. Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Simanindo; 4. Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Danau Lindu.	Paket	4
		1.l	Jumlah Layanan Internal Organisasi : 1. Layanan Perkantoran 2. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3. Transport Rapat dala Kota 4. Rapat Lembur dalam Kantor 5. Digitalisasi Arsip 6. Belanja Keperluan Perkantoran	Paket	6
2.	Terwujudnya Prasarana Transportasi Darat yang berkeselamatan	2.a	Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB	Paket	0
		2.b	Jumlah Lokasi Rehabilitasi / PeningkatanUPPKB : 1. Peningkatan/Rehabilitasi UPPKB (25 lokasi); 2. Rehabilitasi UPPKB Sarang (Kab.Rembang); 3. Rehabilitasi UPPKB Way Urang (Kab. Lampung Selatan)	Paket	27
		2.c	Jumlah Paket Pembangunan Breakwater	Paket	0
		2.d	Jumlah Paket Peningkatan/Rehabilitasi Breakwater 1. Rehabilitasi Breakwater Pelabuhan Penyeberangan Bira (Selesai)	Paket	1
3.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat	3.a.	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Darat: 1. Penyusunan Rencana Induk dan DED Terminal Penumpang Tipe A 2. In House Consultant Bidang Terminal Angkutan Jalan	Laporan	38

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			1. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Jangkang Dua-Tahap V (Selesai); 2. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sunyat-Tahap IV (Selesai); 3. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike-Tahap IV (Selesai); 4. Pembangunan Dermaga Sungai Durian Tahap III Kab. Sintang (Selesai); 5. Pembangunan Dermaga Sungai Batu Dinding Kab. Mahakam Hulu (Selesai); 6. Pembangunan Dermaga Sungai Karang Baru-Sumsel Tahap III (selesai); 7. Pembangunan Dermaga Sungai RMP di Sungai Katingan (Selesai)		
		1.h	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Lanjutan : 1. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Beau Tokalimbo di Danau Towuti-Tahap VI 2. Pembangunan Dermaga dan Landing Area di Serpis Waduk Jatiluhur (Tahap II).	Paket	2
		1.i	Jumlah Paket Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Tahap II (Selesai); 2. Peningkatan Pelabuhan UPT Penyeberangan Kalabahi; 3. Peningkatan Pelabuhan UPT Penyeberangan Kariangau (Selesai); 4. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Bira; 5. Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Pamatata	Paket	5
		1.j	Jumlah Paket Rehabilitasi/ Peningkatan Dermaga Sungai : 1. Pembangunan Dermaga Sungai Petanak di Sungai Kahayan (Selesai); 2. Peningkatan dan Rehab Dermaga Sungai di Danau Mare	Paket	2

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			2. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pecah Buyung - Tahap IV; 3. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bahaur (Fasilitas Pelengkap) 4. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sintete - Tahap IV (Selesai); 5. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sebuku Kab Kotabaru - Tahap V; 6. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pure - Tahap IV (Selesai); 7. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bombana Lintas Bombana - Tj. Phising Tahap III (Selesai); 8. Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Raha Tahap I; 9. Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Sikeli (Tj. Phising) Tahap IV (Selesai); 10. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso - Tahap II; 11. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Miangas - Tahap IV (Selesai); 12. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kesui Lintas Gorom - Tior - Kesui Tahap IV (Selesai); 13. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tior Lintas Gorom - Tior - Kesui Tahap IV (Selesai); 14. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Moti - Tahap III (Selesai); 15. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Folley (Pulau Missol) Lintas Wahai - Waigama -Folley - Sorong Tahap VI (Selesai); 16. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Wasior Tahap III; 17. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Matak (Kep. Anambas) Lintas Tanjung Uban - Matak (Selesai).		
		1.g	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Lanjutan :	Paket	7

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			Tipe A Tahap III termasuk supervisi (Sarolangun, Wonogiri, Sei Ambawang, Pekalongan, Pemalang, Batu Ampar) 2. Pembangunan Terminal Tidar Magelang tahap I; 3. Pembangunan Terminal Liwas Kota Manado tahap VI; 4. Pembangunan Terminal Buroko tahap V; 5. Pembangunan Terminal Tangkoko tahap III. 6. Pengadaan Fasilitas Keamanan (Checking Point/Metal Detector/CCTV) Terminal Penumpang Tipe A 7. Pengadaan Peralatan Penunjang Energi Mandiri di Terminal Penumpang Tipe A		
		1.c.	Jumlah Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru : 1. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit (Lintas Pecah Buyung - Alai); 2. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Raijua di Pulau Raijua Kabupaten Sabu Raijua - Tahap I.	Paket	2
		1.d	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Baru : 1. Pembangunan Dermaga Sungai Sri Menanti	Paket	1
		1.e	Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Baru : 1. Pembangunan Dermaga Ambarita di KSPN Danau Toba	Paket	1
		1.f	Jumlah Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan : 1. Lanjutan Pembangunan Dermaga Penyeberangan (Ro Ro) di Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Lintas Sibolga - Gunungsitoli - Tahap IV;	Paket	17

Kegiatan Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat		Anggaran	
Kegiatan			
1.	Monitoring Bidang Prasarana	Rp.	10.757.222.000
2.	Bimbingan Teknis Bidang Prasarana	Rp.	3.759.186.000
3.	Penyusunan Dokumen Pra FS, FS, SID, DED, Masterplan, dan Rencana Induk	Rp.	54.483.410.000
4.	Dokumen Perencanaan Teknis Penunjang KPBU	Rp.	10.539.261.000
5.	Dokumen Perencanaan Teknis (Priorotas Nasional)	Rp.	1.645.412.000
6.	Layanan Internal Organisasi	Rp.	7.032.820.000
7.	Honor Kegiatan	Rp.	403.760.000
	Jumlah anggaran kegiatan Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	**Rp.**	**88.621.071.000**

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat	1.a.	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal : 1. Pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong 2. Pembangunan Terminal Transit Penumpang Entikong	Paket	2
		1.b.	Jumlah Lokasi Rehabilitasi / Peningkatan Pembangunan Terminal : 1. Perbaikan Pelayanan dan Ketertiban Terminal Penumpang	Paket	7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

Jumlah kegiatan di Rencana Kinerja Tahun 2018 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebanyak **100 kegiatan** dengan Total Pagu Anggaran **Rp.88.621.071.000. ,-**

1.1 Rencana Strategis Pada Tahun 2018

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat	Jumlah Layanan Internal Organisasi		Kegiatan	4
2.	Terwujudnya Prasarana Transportasi Darat Yang Berkeselamatan		-	-	-
3.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat	3.a.	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Darat	Laporan	75
		3.b	Jumlah Monitoring Prasarana Transportasi Darat	Kegiatan	16
		3.c.	Jumlah Sistem Informasi Prasarana Transportasi Darat	Paket	2
		3.d	Jumlah Bimbingan Teknis dan Sosialiasasi Bidang Prasarana Transportasi Darat	Kegiatan	8

1. Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
3. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
4. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program–program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN** memuat Penjelasan umum organisasi, Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.
2. **BAB II PERENCANAAN KINERJA** memuat Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018.
3. **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** memuat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
4. **BAB IV PENUTUP** memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. **LAMPIRAN**
   a. Perjanjian Kinerja;
   b. Pengukuran Kinerja;
   c. Lain-lain yang dianggap perlu.

kelas III. Dari 446 pelabuhan penyeberangan tersebut, 204 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi, dan 242 pelabuhan penyeberangan tahap rencana.

Salah satu kendala yang ditemui dalam upaya penyediaan prasarana pelabuhan penyeberangan adalah permasalahan lahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, disebutkan jika pembangunan prasarana yang dibiayai dengan APBN kebutuhan lahannya disediakan oleh pihak lain, maka harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan lahan dan usulan hibah dari pihak tersebut kepada Kementerian Perhubungan.

Pada tahun anggaran 2017, kegiatan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teor di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku tidak dapat dilanjutkan pembangunannya disebabkan adanya permasalahan lahan terkait permintaan ganti rugi dari masyarakat. Demikian pula di Pelabuhan Penyeberangan Lamerang di Pulau Wokam Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku yang pembangunan fasilitas pelabuhannya sudah selesai dilaksanakan, di tengah jalan terdapat permintaan ganti rugi masyarakat pada lahan yang digunakan untuk jalan akses. Hal ini kedepannya akan menjadi masukan bagi Direktorat Prasarana Perhubungan Darat, bahwa ketersediaan lahan dan jalan akses yang merupakan kewajiban pemerintah daerah, serta proses sertifikasi dan hibah lahan dari pemerintah daerah kepada Kementerian Perhubungan terlebih dahulu dilaksanakan hingga posisi *clean and clear* sebelum pengalokasian anggaran APBN untuk kegiatan pembangunan prasarana pelabuhan penyeberangan disetujui.

Terbangunnya fasilitas pelabuhan penyeberangan yang memenuhi aspek teknis dan nyaman bagi pengguna merupakan tugas dari pemerintah. Untuk itu berbagai kendala yang selama ini ditemui akan menjadi masukan bagi perbaikan proses dan pelaksanaan pembangunan prasarana pelabuhan penyeberangan ke depan.

5. Penyelenggaraan Bimbingan Kepengusahaan

Sebagai tindak lanjut amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan bahwa kewenangan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dan Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor beralih kewenangan dari Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dari keseluruhan prasarana perhubungan darat tersebut belum dimaksimalkan pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara terdapat 5 (lima) bentuk skema pemanfaatan yaitu Pinjam Pakai, Sewa, Bangun Serah Guna (BGS) dan Bangun Guna Serah (BGS), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama dalam Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Melaui skema pemanfaatan BMN yang ada diharapkan dapat mengoptimalkan BMN serta meningkatkan PNBP dengan tidak merubah tugas dan fungsi Kemterian/Lembaga.

Salah satu kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan kepengusahaan adalah Kepemilikan aset prasarana baik Terminal Tipe A maupun Unit Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) belum tercatat dalam SIMAK BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sehingga proses kerjasama tidak dapat dilakukan karena terkendala Penetapan Status Penggunaan (PSP).

1.4.2.4 Permasalahan Keselamatan Transportasi Darat

penyeberangan. Pada prinsipnya transportasi penyeberangan menyediakan layanan ulang alik yang memiliki jadwal tetap dan teratur yang menghubungkan dua titik, dimana barang yang diangkut harus dimasukkan dalam kendaraan atau bukan barang lepas. Ditinjau dari sisi pelayanan, dalam merencanakan layanan transportasi penyeberangan diawali dengan membuka lintasan, membangun pelabuhan serta armada (kapal Ro-Ro) hingga transportasi penyeberangan dapat beroperasi secara optimal baik secara komersil maupun perintis melalui subsidi angkutan. Hal ini sebagai bentuk upaya transportasi penyeberangan dalam membuka keterisolasian wilayah, dimana perlu didukung dengan pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan alat mobilitas penduduk di wilayah tersebut.

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pelabuhan penyeberangan dibagi menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu :

a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I

   Penetapan pelabuhan penyeberangan kelas I harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut :

   1) Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
   2) Menghubungkan Jalan Arteri Primer (JAP); Jalan tol, Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1), jalan strategis nasional dan antar negara;
   3) Lokasi pelabuhan secara strategis berada pada sabuk penyeberangan nasional dan penghubung antar sabuk;
   4) Pelabuhan yang diusahakan secara komersil.

b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II

   Penetapan pelabuhan penyeberangan kelas II harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut :

   1) Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
   2) Menghubungkan JAP, jalan tol, JKP-1 dan jalan strategis nasional;
   3) Lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional;
   4) Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

c. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III

   Penetapan pelabuhan penyeberangan kelas III harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut :

   1) Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
   2) Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jalan JKP-2, JKP-3, JKP-4 dan jalan yang tidak termasuk pada kriteria pelabuhan untuk angkutan penyeberangan kelas 1 maupun kelas 2.
   3) Lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional;
   4) Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

Berdasarkan pembagian kelas pelabuhan penyeberangan tersebut maka saat ini pelabuhan penyeberangan di indonesia terdiri 446 pelabuhan penyeberangan dari 133 pelabuhan penyeberangan kelas I, 158 pelabuhan penyeberangan kelas II, dan 155 pelabuhan penyeberangan

Angkutan sungai dan danau dapat berkembang baik di Indonesia, karena secara alamiah kita memiliki banyak sungai dan danau yang berpotensi untuk dilayari. Khususnya pada kawasan pedalaman yang belum tersentuh infrastruktur jalan raya, sehingga angkutan sungai maupun danau menjadi transportasi andalan bagi masyarakat sekitar untuk bergerak dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini juga teradi pada kota-kota yang tumbuh di pinggir sungai, walaupun secara infrastruktur jalan sudah memadahi, namun masyarakat secara turun temurun sudah menggunakan angkutan sungai dalam kehidupan sehari-hari. Angkutan sungai memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan angkutan berbasis jalan raya, antara lain lebih ekonomis karena tidak memerlukan biaya yang besar untuk pembangunan infrastrukturnya, ramah lingkungan serta dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban jalan raya terutamanya angkutan barang volume besar.

Disamping hal tersebut, saat ini telah terjadi pergeseran pandangan dalam melihat sektor pariwisata Indonesia sebagai salah satu sumber devisa bagi negara. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan potensi transportasi sungai dan danau sebagai pendukung pariwisata disamping untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Penetapan Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional merupakan komitmen Pemerintah dalam upaya mendorong sektor pariwisata. Dengan kondisi tersebut, maka saat ini angkutan sungai dan danau sangat berpotensi dan layak untuk dikembangkan pada masa mendatang.

Salah satu kendala yang sering ditemui dalam upaya penyediaan prasarana pelabuhan sungai dan danau adalah permasalahan lahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, disebutkan jika pembangunan prasarana yang dibiayai dengan APBN kebutuhan lahannya disediakan oleh pihak lain, maka harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan lahan dan usulan hibah dari pihak tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Pada TA. 2017 Pelabuhan Sri Menanti gagal dilaksanakan karena proses hibah lahannya terkendala. Hal ini kedepannya akan menjadi koreksi bagi Direktorat Prasarana Perhubungan Darat, bahwa kejelasan status lahan harus menjadi perhatian dalam penyusunan kegiatan pembangunan prasarana sungai dan danau.

4. Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang meghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).

Pengembangan transportasi penyeberangan sebagai penghubung jaringan jalan atau jalan rel menjadi cukup mendesak mengingat laju perkembangan otonomi daerah yang ditandai dengan pesatnya pembangunan infrastruktur wilayah terutama jalan raya. Beberapa daerah yang semula relatif terisolasi pun diharapkan dapat dikembangkan dengan penyelenggaraan moda penyeberangan. Dinamika yang ada tersebut menuntut Direktorat Prasarana Perhubungan Darat untuk mengembangkan simpul penyeberangan berupa prasarana pelabuhan penyeberangan.

Transportasi penyeberangan saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam sektor transportasi sejalan dengan program pemerintah melalui konsep NAWACITA, dimana transportasi penyeberangan dapat menghubungkan daerah yang terluar, terpencil, terdepan serta sebagai feeder transportasi laut untuk mendukung konsep Tol Laut.

Transportasi penyeberangan secara tidak langsung berperan sebagai penghubung lintas pada jalur pelayaran laut maupun pelayaran perintis. Keberadaan transportasi penyeberangan juga dapat bersifat sebagai *shortcut* atau memperpendek jarak tempuh, sebagaimana definisi dari angkutan

17	D.I. Yogyakarta	Kulwaru
18	Jawa Timur	Widodaren
19	Jawa Timur	Sedarum
20	Jawa Timur	Rejoso
21	Jawa Timur	Widang
22	Bali	Cekik
23	Kalimantan Barat	Siantan
24	Kalimantan Tengah	Anjir Serapat
25	Sulawesi Utara	Wangurer-Bitung
26	Sulawesi Selatan	Maccopa

Sebanyak 9 UPPKB diantaranya dijadikan sebagai *Pilot Project* bekerjasama dengan PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia, yaitu :

1. UPPKB Seumadam, Aceh
2. UPPKB Sarolangun, Jambi
3. UPPKB Senawar Jaya, Sumatera Selatan
4. UPPKB Losarang, Jawa Barat
5. UPPKB Wanareja, Jawa Tengah
6. UPPKB Widang, Jawa Timur
7. UPPKB Widodaren, Jawa Timur

2. Permasalahan Penyelenggaraan UPPKB

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan UPPKB, yaitu:

1) Kondisi Prasarana UPPKB yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam PM 134 Tahun 2015.
2) Keterbatasan jumlah SDM untuk operasional UPPKB baik dari sisi kuantitas maupun kualitas karena beberapa daerah tidak menyerahkan personil ke Kementerian Perhubungan.
3) Sistim penegakan hukum dan sanksi belum menimbulkn efek jera dan masih rentan terhadap penyalahgunaan (pungutan liar).
4) NSPK belum sepenuhnya dilaksankan oleh petugas dilapangan.
5) Pengawasan yang dilakukan masih bersifat manual sehingga kurang efektif maka perlunya dibangun suatu sistem pengawasan yang menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan mencari langkah-langkah strategis demi terwujudnya pengelolan UPPKB yang sesuai dengan slogannya yaitu "Jembatan Timbang Wow Semakin Pas dan Keren".

3. Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau

Tabel 2.3 UPPKB yang tidak diserah Terimakan ke Kementerian Perhubungan.

NO	PROVINSI	NAMA UPPKB	KETERANGAN
1	Riau	1 Tarantang Manuk	Tanah milik Pemkab
2	Jawa Tengah	1 Butuh	Tanah milik Pemkab Purworejo
		2 Tugu	UPPKB Telah Beralih Fungsi
		3 Katon Sari	Tanah milik Pemkab Demak
3	Bengkulu	3 Air Sebakul	Tidak ada sertifikat tanah
4	Sumatera Utara	4 Amurang	Tidak ada sertifikat tanah

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 2631/AJ.005/DRJD/2017 tentang Penetapan Pengoperasian UPPKB di seluruh Indonesia, Pada tahun 2017, jumlah UPPKB yang dioperasika hanya sebanyak 26 UPPKB. Hal ini dengan pertimbangan kondisi fasilitas UPPKB yang rusak, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta keterbatasan anggaran yang ada, Daftar UPPKB yang beroperasi pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	PROVINSI	NAMA UPPKB
1	Aceh	Seumadam
2	Aceh	Subulussalam
3	Sumatera Utara	Sibolangit
4	Sumatera Utara	Mambang Muda
5	Sumatera Barat	Tanjung Balik
6	Riau	Balai Raja
7	Jambi	Jambi-Merlung
8	Jambi	Sarolangun
9	Sumatera Selatan	Pematang Panggang
10	Sumatera Selatan	Kota Baru
11	Sumatera Selatan	Senawar Jaya
12	Bengkulu	Padang Ulak Tanding
13	Jawa Barat	Losarang
14	Jawa Barat	Balonggandu
15	Jawa Tengah	Subah
16	Jawa Tengah	Wanareja

NO	PROVINSI	NAMA UPPKB	
		4	Lumpue
		5	Datae
		6	Walenrang
		7	Larompong
		8	Buntu Datu
		9	Sajoanging
		10	Tana Batue
		11	Bulu Dua
		12	Tonrokasi
26	Sulawesi Utara	1	Inobonto
		2	Pineleng
		3	Wangurer - Bitung
	TOTAL		***131***

Tabel 2.2 UPPKB yang belum diserah terimakan

ke Kementerian Perhubungan

NO	PROVINSI	NAMA UPPKB	
1	Papua	1	Waena
2	Banten	1	Cimanuk
		2	Cikande
		3	Batu Ceper
	TOTAL		***4***

Sedangkan 6 (enam) UPPKB yang tidak diserahterimakan kepada Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

NO	PROVINSI	NAMA UPPKB	
		3	Moutong
		4	Mayoa
20	Kalimantan Barat	1	Siantan
		2	Sedau
		3	Satong
		4	Sosok
		5	Sekadau
		6	Sintang
21	Jawa Tengah	1	Banyudono
		2	Selogiri
		3	Toyogo
		4	Klepu
		5	Pringsurat
		6	Salam
		7	Gubug
		8	Wanareja
		9	Lebuawu
		10	Sambong
		11	Sarang
		12	Ajibarang
		13	Tanjung
		14	Subah
22	Gorontalo	1	Marisa
		2	Molotabu
23	Aceh	1	Seumadam
		2	Subulusalam
24	Bengkulu	1	Padang Ulak
		2	Tais
	Sulawesi Selatan	1	Palangga
		2	Somba Opu
		3	Maccopa

NO	PROVINSI	NAMA UPPKB	
		9	Klakah
		10	Singosari
		11	Trowulan
		12	Guyangan
		13	Widodaren
		14	Sedarum
		15	Rejoso
		16	Jrengik
		17	Trosobo
		18	Besuki
		19	Widang
		20	Pojok
17	Jawa Barat	1	Gentong
		2	Sindang Rasa
		3	Tomo
		4	Losarang
		5	Balonggandu
		6	Cibaragalan
		7	Bojong
		8	Kemang Bogor
18	Sumatera Barat	1	Kamang
		2	Lubuk Buaya
		3	Tanjung Balik
		4	Sungai Langsat
		5	Lubuk Selasih
		6	Air Haji
		7	Kubu Kerambi
		8	Beringin
		9	Sitangkai
19	Sulawesi Tengah	1	Kayumalue
		2	Toboli

NO	PROVINSI	NAMA UPPKB	
		2	Simpang Pematang
		3	Balambang Umpu
6	DI Yogyakarta	1	Kulwaru
		2	Kalitirto
		3	Martani
7	Kalimantan Tengah	1	Anjir Serapat
		2	Pasar Panas
8	Kalimantan Selatan	1	Liang Anggang
		2	Kintap
9	Kalimantan Timur	1	Karang Joang
10	NTB	1	Bertais
		2	Poto Tamo
11	NTT	1	Oesapa
		2	Nun Baun Sabu
		3	Nggorang
		4	Watualo
12	Sulawesi Tenggara	1	Sambilambo
13	Sulawesi Barat	1	Beru Beru
		2	Paku
		3	Sarjo
14	Maluku	1	Passo
15	Bali	1	Cekik
		2	Seririt
16	Jawa Timur	1	Socah
		2	Watudodol
		3	Kalibaru Manis
		4	Talun
		5	Baureno
		6	Rambi Gundam
		7	Mojoagung
		8	Lamongan

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA TERMINAL
11	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu	Terminal Air Sebakul
12	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	Terminal Arga Makmur
13	Provinsi Banten	Kota Tangerang	Terminal Poris Plawad
14	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Kp. Rambutan
15	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Utara	Terminal Tanjung Priok
16	Provinsi Banten	Kota Tangerang Selatan	Terminal Pondok Cabe
17	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Pulo Gebang
18	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat	Terminal Kaliders
19	Provinsi Jawa Barat	Kota Bekasi	Terminal Induk Bekasi
20	Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	Terminal Jatijajar
21	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor	Terminal Baranangsiang
22	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	Terminal Kalijaya
23	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Terminal Cicahem
24	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Terminal Leuwipanjang
25	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Terminal Terboyo
26	Provinsi Jawa Tengah	Kota Tegal	Terminal Tegal
27	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	Terminal Sapen
28	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banjar Negara	Terminal Banjar Negara
29	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	Terminal Sri Tanjung
30	Provinsi Jawa Timur	Kabuoaten Situbondo	Terminal Situbondo
31	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pamekasan	Terminal Ronggosukowati
32	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya	Terminal Oso Wilangun
33	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya	Terminal Purabaya
34	Provinsi Bali	Kabupaten Gianyar	Terminal Gianyar
35	Provinsi Bali	Kota Denpasar	Terminal Ubung
36	Provinsi Bali	Kabupaten Karangasem,	Terminal Karangasem
37	Provinsi Bali	Kabupaten Buleleng	Terminal Banyuasri
38	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Barat	Terminal Sweta
39	Provinsi NTT	Kabupaten Belu	Terminal Motoain
40	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	Terminal Kota Bangun
41	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	Terminal Malalayang

Acara Serah Terima (BAST) Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D), 4 (empat) UPPKB sisanya belum dilakukan serah terima dan 6 UPPKB tidak diserahkan, Adapun daftar rincian UPPKB sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 UPPKB yang diserahterimakan ke Kementerian Perhubungan

NO	PROVINSI	NAMA UPPKB	
1	Sumatera Utara	1	Tanjung Morawa I
		2	Tanjung Morawa II
		3	Dolok Melangir
		4	Simpang Dua
		5	Simpang Runding
		6	Sibolangit
		7	Gebang
		8	Dolok Estate
		9	Mambang Muda
		10	Aek Batu
		11	Sabungan
		12	PAL XI
		13	Jembatan Merah
2	Riau	1	Balai Raja
		2	Rantau Berangin
		3	Muara Lembu
3	Jambi	1	Jambi - Merlung
		2	Muara Tembesi
		3	Sarolangun
		4	Sungai Penuh
4	Sumatera Selatan	1	Pematang Panggang
		2	Kota Baru
		3	Merapi
		4	Simpang Nibung
		5	Senawar Jaya
5	Lampung	1	Way Urang

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA TERMINAL
42	Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu	Terminal Palu
43	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makasar	Terminal Daya
44	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kendari	Terminal Bangkutoko
45	Provinsi Gorontalo	Kota. Gorontalo	Terminal Dungingi
46	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	Terminal Majene

Permasalahan-permasalahan yang sering ditemui dilapangan terkait pengelolaan terminal tipe A meliputi beberapa faktor antara lain:

1) Tingkat pelayanan jalan, yang menyangga di lingkungan terminal kurang memadai secara fisik jalan, tidak efektif dan efisien sehingga menghambat proses perpindahan moda angkutan penumpang.
2) Aksesibilitas, terminal dengan simpul-simpul pergerakan masyarakat kurang terpadu sehingga tidak jarang didapati keengganan masyarakat maupun angkutan umum masuk ke dalam terminal.
3) Keamanan lingkungan sebagian besar terminal selama ini kurang mendukung bagi keamanan para pengguna jasa terminal, hal ini ditandai dengan maraknya aksi kejahatan seperti halnya pencopetan, pemalakan, dan premanisme sehingga mempengaruhi terhadap antusias pengunjung/penumpang menggunakan jasa pelayanan terminal.
4) Kenyamanan terminal yang belum terpenuhi sesuai harapan masyarakat pengguna jasa terminal, tidak jarang ditemukan terminal yang kurang baik dalam mengelola kebersihan dan ketertiban wilayah kerja terminal serta tata letak/lay out terminal yang tidak menunjang bagi kenyamanan para calon penumpang.
5) Fasilitas penunjang terminal sering kali terabaikan beberapa terminal sudah ada yang menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang seperti halnya fasilitas sosial, ibadah dan komersial. Namun fasilitas tersebut rata-rata terbengkalai dan kumuh karena tidak maksimal dalam pemeliharaan dan perawatannya.
6) Manajemen pengelolaan terminal belum sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku. Disamping itu kompetensi SDM pelaksana di lapangan belum sesuai kapasitasnya. Kegiatan perencanaan, pengembangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap arus kendaraan umum yang masuk, parkir dan keluar dari terminal tidak teratur sehingga kinerja pelayanan terminal tidak berjalan dengan baik.

Namun demikian tidak semua kondisi terminal tipe A memiliki permasalahan seperti halnya di atas, di beberapa Pemerintah Daerah ada pula yang telah berjalan relatif baik. Dari kondisi permasalahan tersebut di atas, dengan pemindahan kewenangan pengelolaan terminal tipe A kepada Pemerintah Pusat secara bersamaan pula permasalahan-permasalahan dimaksud menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah pusat untuk menyelesaikannya

1. Penyelenggaraan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Sebagai tindak lanjut amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 141 UPPKB yang wajib diserahterimakan pengelolaannya dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian sampai dengan posisi 31 Desember 2016 hanya terdapat 131 (seratus tiga puluh satu) UPPKB yang telah dilakukan penandatanganan Berita

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA TERMINAL
85	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar	Terminal Gambut Barakat
86	Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	Terminal W.A Gara
87	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	Terminal Liwas
88	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bolang Mongondow Utara	Terminal Boroko
89	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bitung	Terminal Tangkoko
90	Provinsi Gorontalo	Kabupaten. Gorontalo	Terminal Isimu
91	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Poso	Terminal Kasintuwu
92	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	Terminal Induk Lumpue
93	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Barru	Terminal Latenri Sessu Pekkae
94	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	Terminal Watampone
95	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten. Poliwalimandar	Terminal Tipalayo
96	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	Terminal Simbuang
97	Provinsi Papua	Kota Jayapura	Terminal Entrop

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 853 tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia, 97 terminal penumpang tipe A di atas telah ditetapkan sebagai lokasi terminal penumpang tipe A.

Tabel 1.2 Terminal penumpang tipe A yang belum diserahterimakan ke Kementerian Perhubungan

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA TERMINAL
1	Provinsi Sumatera Utara	Kota Sibolga	Terminal Sibolga
2	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu	Terminal Padang Bulan
3	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	Terminal Panyabungan
4	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan	Terminal Amplas
5	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan	Terminal Pinang Baris
6	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hilir	Terminal Indragiri Hulu
7	Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh	Terminal Sungai Penuh
8	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Muara Enim	Terminal Muara Enim
9	Provinsi Sumatera Selatan	Kabuoaten Lahat	Terminal Lahat,
10	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Lubuk Linggau	Terminal Simpang Periuk

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA TERMINAL
55	Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga	Terminal Tingkir
56	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	Terminal Gunung Simping
57	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	Terminal Purwokerto
58	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten. Purworejo	Terminal Purworejo
59	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Ponorogo	Terminal Selo Aji
60	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Tulungagung	Terminal Gayatri
61	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pacitan	Terminal Pacitan
62	Provinsi Jawa Timur	Kota Kediri	Terminal Tamanan
63	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Ngawi	Terminal Kertonegoro
64	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun	Terminal Purboyo
65	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	Terminal Surodakan
66	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Bojonegoro	Terminal Rajekwesi
67	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Bangkalan	Terminal Bangkalan
68	Provinsi Jawa Timur	Kota Probolinggo	Terminal Banyuangga
69	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Jember	Terminal Tawangalun
70	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sumenep	Terminal Arya Wiraraja
71	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan	Terminal Pasuruan
72	Provinsi Jawa Timur	Kota Malang	Terminal Arjosari
73	Provinsi Jawa Timur	Kota Blitar	Terminal Patria
74	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Tuban	Terminal kembang Putih
75	Provinsi Bali	Kabuoaten Badung	Terminal Mengwi
76	Provinsi NTB	Kota Mataram	Terminal Mandalika
77	Provinsi NTB	Kabupaten Sumbawa	Terminal Sumer Payung
78	Provinsi NTB	Kota Bima	Terminal Dara
79	Provinsi NTT	Kabupaten Timor Tengah Utara	Terminal Kefamenanu
80	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Terminal Samarinda Seberang
81	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Terminal Batu Ampar
82	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Singkawang	Terminal Singkawang
83	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sanggau	Terminal Entikong
84	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Kubu Raya	Terminal Sie Ambawang

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA TERMINAL
24	Provinsi Bengkulu	Kebupaten Rjang Lebong	Terminal Simpang Nangka
25	Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Tengah	Terminal Betan Subing
26	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung	Terminal Rajabasa
27	Provinsi Banten	Kota Cilegon	Terminal Merak
28	Provinsi Banten	Kabupaten Pandeglang	Terminal Labuan
29	Provinsi Banten	Kabupaten Lebak	Terminal Lebak
30	Provinsi Banten	Kota Serang	Terminal Pakupatan
31	Provinsi Jawa Barat	Kota Sukabumi	Terminal Sudirman
32	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Kuningan	Terminal Kuningan
33	Provinsi Jawa Barat	Kota Cirebon	Terminal Harjamukti
34	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	Terminal Ciakar
35	Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	Terminal Indihiang
36	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Garut	Terminal Guntur Melati
37	Provinsi Jawa Barat	Kota Banjar	Terminal Betung
38	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Subang	Terminal Subang
39	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Karawang	Terminal Cikampek
40	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Terminal Giwangan
41	Provinsi DI Yogyakarta	Kabupaten Gunungkidul	Terminal Dhaksinarga
42	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonogiri	Terminal Giri Adipura
43	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang	Terminal Tidar
44	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Terminal Mangkang
45	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	Terminal Jati
46	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten. Blora	Terminal Cepu
47	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	Terminal Bawen
48	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten. Pemalang	Terminal Induk Pemalang
49	Provinsi Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Terminal Pekalongan
50	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Kebumen	Terminal Kebumen
51	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Purbalingga	Terminal Bobot Sari
52	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	Terminal Mendolo
53	Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta	Terminal Tirtonadi
54	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	Terminal Ir. Soekarno

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, dari 143 terminal penumpang tipe A yang wajib diserahterimakan pengelolaannya dari Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Pusat namum demikian sampai dengan posisi per Desember 2016 terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) terminal yang telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) dan 46 (empat puluh enam) terminal yang belum dilaksanakan serah terima, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Terminal penumpang tipe A yang diserahterimakan ke Kementerian Perhubungan

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA TERMINAL
1	Provinsi NAD	Kota Langsa	Terminal Langsa
2	Provinsi NAD	Kota Lhokseumawe	Terminal Lhoksumawe
3	Provinsi NAD	Kota Meulaboh	Terminal Meulaboh
4	Provinsi NAD	Kota Banda Aceh	Terminal Batoh
5	Provinsi Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	Terminal Tanjung Pinggir
6	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	Terminal Madya
7	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang	Terminal Anak Air
8	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Sijunjung	Terminal Kiliran Jao
9	Provinsi Sumatera Barat	Kota Solok	Terminal Bareh Solok
10	Provinsi Sumatera Barat	Kota Bukit Tinggi	Terminal Simpang Aur
11	Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman	Terminal Jati
12	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	Terminal Payung Sekaki
13	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar	Terminal Bangkinang
14	Provinsi Riau	Kota Dumai	Terminal Dumai
15	Provinsi Jambi	Kota Jambi	Terminal Alam Barajo
16	Provinsi Jambi	Kabupaten Sarolangun,	Terminal Sarolangun,
17	Provinsi Jambi	Kabuapten Bungo	Terminal Muara Bungo
18	Provinsi Jambi	Kabupaten Marangin,	Terminal Bangko
19	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Terminal Karya Jaya
20	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Terminal Alang-Alang Lebar
21	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten OKI	Terminak Kayuagung
22	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten OKU	Terminal Batu Kuning
23	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Banyuasin	Terminal Betung

1.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan Potensi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang transportasi darat.

Potensi pengembangan pada bidang Transportasi darat adalah sebagai berikut :

a. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan transportasi darat akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
b. Teknologi transportasi darat akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
c. Dengan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan pelayanan transportasi darat akan memperluas jangkauan pelayanan dengan kualitas pelayanan yang makin baik;
d. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dan akan mempermudah posisi Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan transportasi darat berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi amdal sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan transportasi darat yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh lembaga-lembaga yang telah ada (Bapedal, Bapedalda atau lembaga teknis lainnya) baik di pusat maupun di daerah. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dalam menangani masalah lingkungan dapat disinergikan menjadi kekuatan yang efektif untuk melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan skala operasi obyek pemantauan lingkungan.

1.4.1. Permasalahan

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A

Sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pegawai Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berdasarkan klasifikasi pendidikan terakhir terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	SMA	D3	S1	S2	S3
1	Direktur	-	-	-	1	-
2	Subdit Terminal Angkutan Jalan	1	1	3	7	-
3	Subdit Penimbangan Prasarana Kendaraan Bermotor	-	1	4	5	-
4	Subdit Pelabuhan Sungai dan Danau	1	1	4	3	1
5	Subdit Pelabuhan Penyeberangan	1	-	1	5	-
6	Subdit Bimbingan Kepengusahaan		1	4	3	
7	Subag Tata Usaha	2	2	3	-	-
	TOTAL	**5**	**6**	**19**	**24**	**1**

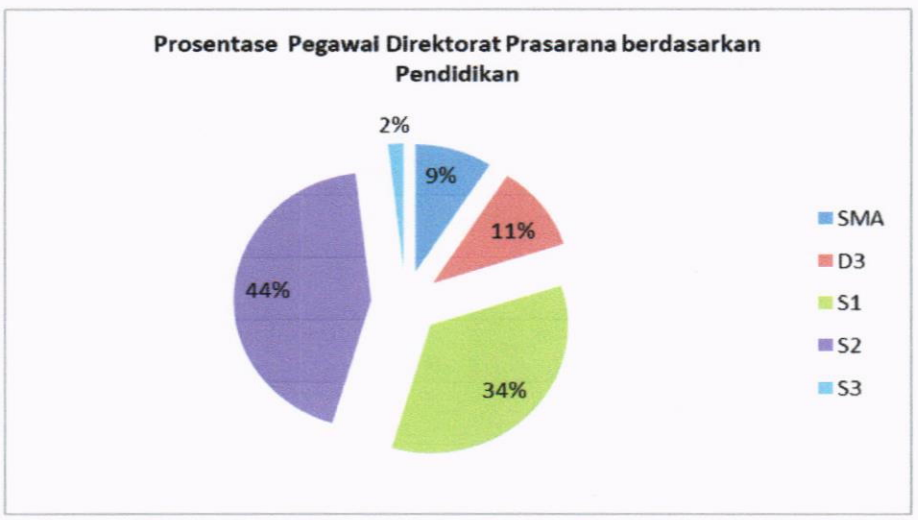

Gambar 1.1. Prosentase Pegawai Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Berdasarkan Pendidikan

Mempunyai tugas Melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

4. Kelompok jabatan fungsional

   Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan.

1.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perhubungan Darat saat ini sumber daya manusia yang tersedia yaitu 23 orang PPNPN dan 55 orang ASN dengan total pegawai 78 orang. Jumlah Pegawai ASN Direktorat Prasarana Perhubungan Darat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Direktorat Prasarana Perhubungan Darat

No.	Uraian	Orang
1	Direktur	1
2	Subdit Terminal Angkutan Jalan	12
3	Subdit Penimbangan Prasarana Kendaraan Bermotor	10
4	Subdit Pelabuhan Sungai dan Danau	10
5	Subdit Pelabuhan Penyeberangan	7
6	Subdit Bimbingan Kepengusahaan	8
7	Subag Tata Usaha	7
	TOTAL PEGAWAI	**55**

pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Bimbingan Kepengusahaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program dan operasi pengusahaan prasarana transportasi darat;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program operasi pengusahaan transportasi darat;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan operasi pengusahaan prasarana transportasi darat;
d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang program dan operasi pengusahaan prasarana transportasi darat;dan
e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pengusahaan prasarana transportasi darat.

Subdirektorat Bimbingan Pengusahaan terdiri atas:

a. Seksi Program Kepengusahaan
   Seksi Program Kepengusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang sinkronisasi program kepengusahaan prasarana transportasi darat.

b. Seksi Operasi Kepengusahaan.
   Seksi Operasi Kepengusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang operasi kepengusahaan prasarana transportasi darat.

6. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

1. Subbagian Tata Usaha

   Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

2. Prasarana Transportasi Jalan

   Mempunyai tugas melakukan Melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional, pengujian berkala kendaraan bermotor dan industry karoseri.

3. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis

prasarana transportasi penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan penyeberangan, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi penyeberangan tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas penyeberangan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi penyeberangan, pengesahan rancang bangun pelabuhan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan penyeberangan, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi penyeberangan tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas penyeberangan; dan

e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi penyeberangan, pengesahan rancang bangun pelabuhan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan penyeberangan, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi penyeberangan tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas penyeberangan.

Subdirektorat Pelabuhan Penyeberangan, terdiri dari :

a. **Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Penyeberangan Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Penyeberangan**

   Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Penyeberangan Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang rancang bangun pelabuhan Penyeberangan, pengesahan rancang bangun dan pembangunan pelabuhan Penyeberangan.

b. **Seksi Pengawasan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan**

   Seksi Pengawasan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pengelolaan pelabuhan Penyeberangan, penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan pelabuhan Penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi Penyeberangan, penyusunan rencana induk jaringan prasarana transportasi Penyeberangan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas Penyeberangan serta kompetensi petugas pelabuhan Penyeberangan.

5. **Subdirektorat Bimbingan Kepengusahaan**

   Subdirektorat Bimbingan Kepengusahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

Subdirektorat Pelabuhan Sungai dan Danau, terdiri dari :

a. **Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Sungai dan Danau Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Sungai dan Danau**
   Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Sungai dan Danau Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Sungai dan Danau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang rancang bangun pelabuhan sungai dan danau, pengesahan rancang bangun dan pembangunan pelabuhan Sungai dan Danau.

b. **Seksi Pengawasan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau**
   Seksi Pengawasan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pengelolaan pelabuhan sungai dan danau, penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan pelabuhan sungai dan danau, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, penyusunan rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan danau serta kompetensi petugas pelabuhan sungai dan danau.

4. **Subdirektorat Pelabuhan Penyeberangan**
   Subdirektorat Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelabuhan penyeberangan dan prasarana lalu lintas penyeberangan.

   Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pelabuhan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi penyeberangan, pengesahan rancang bangun pelabuhan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan penyeberangan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas penyeberangan;
   b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi penyeberangan, pengesahan rancang bangun pelabuhan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan penyeberangan, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi penyeberangan tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas penyeberangan;
   c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi penyeberangan, pengesahan rancang bangun pelabuhan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pelabuhan Sungai dan Danau menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan sungai dan danau, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, pengesahan rancang bangun pelabuhan sungai dan danau, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan danau, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan danau serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan danau;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan sungai dan danau, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, pengesahan rancang bangun pelabuhan sungai dan danau, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan danau, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan danau, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi sungai dan danau tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan danau;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan sungai dan danau, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, pengesahan rancang bangun pelabuhan sungai dan danau, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan danau, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan danau, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi sungai dan danau tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan danau;
d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan sungai dan danau, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, pengesahan rancang bangun pelabuhan sungai dan danau, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan danau, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan danau, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi sungai dan danau tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan danau; dan
e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan sungai dan danau, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, pengesahan rancang bangun pelabuhan sungai dan danau, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan danau, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan danau, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi sungai dan danau tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan danau.

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan.

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasaran Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotordi jalan serta kompetensi petugas Pelaksanan Penimbangan Kendaraan Bermotor; dan

e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraaan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas pelaksana Penimbangan Kendaraaan Bermotor di jalan serta.

Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

Seksi Pengawasan Fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dan penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), kompetensi petugas unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, penyelenggaraan fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) serta pengembangan sistem informasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

b. Seksi Rancang Bangun Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

Seksi Rancang Bangun Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang rancang bangun Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), penentuan lokasi, pengesahan rancang bangun, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

3. Subdirektorat Pelabuhan Sungai dan Danau

Subdirektorat Pelabuhan Sungai dan Danau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelabuhan sungai dan danau dan prasarana lalu lintas sungai dan danau.

transportasi jalan, terminal barang, tempat istirahat *(rest area),* fasilitas integrasi antarmoda, pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B, tempat istirahat *(rest area),* dan terminal barang untuk umum, penyelenggaraan terminal penumpang tipe A, terminal barang untuk umum, Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal penumpang, terminal barang, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, tempat istirahat *(rest area),* harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi jalan tingkat nasional, regional dan internasional serta kompetensi petugas terminal angkutan jalan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas jalan.

Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan, terdiri dari :

a. Seksi Terminal Penumpang

Seksi Terminal Penumpang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang terminal penumpang, tempat istirahat (rest area), dan fasilitas integrasi antarmoda, penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tempat istirahat (rest area), dan pembangunan terminal penumpang tipe A dan terminal tipe B, tempat istirahat (rest area), pengembangan jaringan prasarana transportasi jalan dan penyelenggaraan terminal penumpang tipe A, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi penumpang, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas jalan serta kompetensi petugas terminal penumpang.

b. Seksi Terminal Barang

Seksi Terminal Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang terminal barang, penentuan lokasi, pembangunan dan penyelenggaraan terminal barang untuk umum dan terminal barang untuk ekspor-impor, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi barang serta kompetensi petugas terminal barang.

2. Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor

Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana penimbangan kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang terminal penumpang, terminal barang, pengembangan jaringan prasarana transportasi jalan, pemaduan rencana kegiatan prasarana lalu lintas jalan, rencana induk terminal penumpang, rencana induk jaringan prasarana transportasi jalan, terminal barang, tempat istirahat (rest area), fasilitas integrasi antarmoda, pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B, tempat istirahat (rest area), dan terminal barang untuk umum, penyelenggaraan terminal penumpang tipe A, Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal penumpang, terminal barang, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, tempat istirahat (rest area) serta kompetensi petugas terminal angkutan jalan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas jalan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal penumpang, terminal barang, pengembangan jaringan prasarana transportasi jalan, pemaduan rencana kegiatan prasarana lalu lintas jalan, rencana induk terminal penumpang, rencana induk jaringan prasarana transportasi jalan, terminal barang, tempat istirahat (rest area), fasilitas integrasi antarmoda, pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B, tempat istirahat (rest area), dan terminal barang untuk umum, penyelenggaraan terminal penumpang tipe A, terminal barang untuk umum, Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal penumpang, terminal barang, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, tempat istirahat (rest area), harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi jalan tingkat nasional, regional dan internasional serta kompetensi petugas terminal angkutan jalan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas jalan;
c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal penumpang, terminal barang, pengembangan jaringan prasarana transportasi jalan, pemaduan rencana kegiatan prasarana lalu lintas jalan, rencana induk terminal penumpang, rencana induk jaringan prasarana transportasi jalan, terminal barang, tempat istirahat (rest area), fasilitas integrasi antarmoda, pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B, tempat istirahat (rest area), dan terminal barang untuk umum, penyelenggaraan terminal penumpang tipe A, terminal barang untuk umum, Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal penumpang, terminal barang, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, tempat istirahat (rest area), harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi jalan tingkat nasional, regional dan internasional serta kompetensi petugas terminal angkutan jalan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas jalan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal penumpang, terminal barang, pengembangan jaringan prasarana transportasi jalan, pemaduan rencana kegiatan prasarana lalu lintas jalan, rencana induk terminal penumpang, rencana induk jaringan prasarana transportasi jalan, terminal barang, tempat istirahat (rest area), fasilitas integrasi antarmoda, pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B, tempat istirahat (rest area), dan terminal barang untuk umum, penyelenggaraan terminal penumpang tipe A, terminal barang untuk umum, Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal penumpang, terminal barang, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, tempat istirahat (rest area), harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi jalan tingkat nasional, regional dan internasional serta kompetensi petugas terminal angkutan jalan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas jalan; dan
e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal penumpang, terminal barang, pengembangan jaringan prasarana transportasi jalan, pemaduan rencana kegiatan prasarana lalu lintas jalan, rencana induk terminal penumpang, rencana induk jaringan prasarana

1.2.2 Struktur Organisasi

Kerangka Kelembagaan pada Direktorat Prasarana Perhubungan Darat;

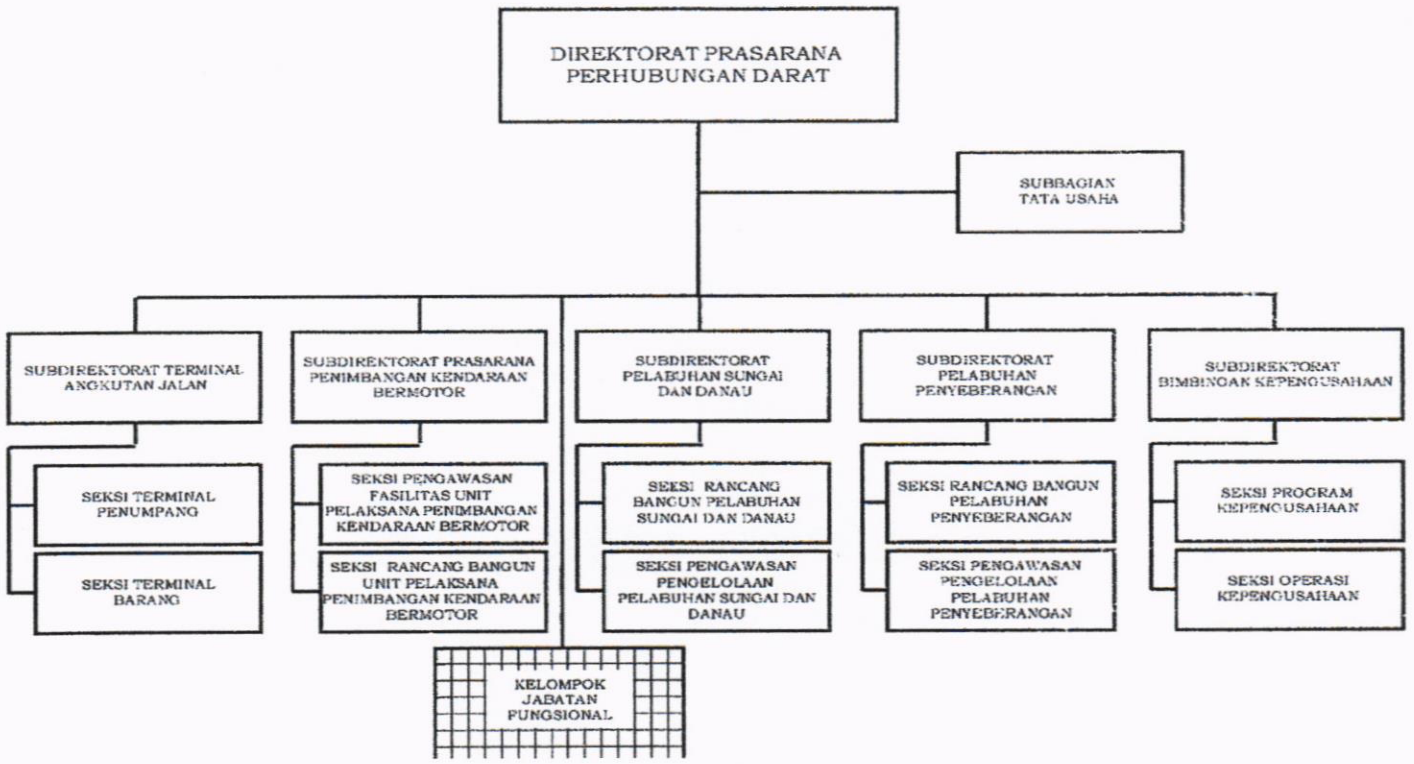

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perhubungan Darat

Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sub bagian dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut :

A. TUGAS DAN FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Prasarana Perhubungan Darat terdiri dari :

1. **Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan**

   Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan dan prasarana lalu lintas jalan.

   Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Perubahan kedua Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 44 Tahun 2017, atas PM 189 Tahun 2105 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Direktorat Prasarana Perhubungan Darat
   Direktorat Prasarana Perhubungan Darat adalah salah satu unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perhubungan Darat.

2. Tugas Direktorat Prasarana Perhubungan Darat
   Direktorat Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat.

3. Fungsi Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antarmoda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;
   b. Penyiapan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antarmoda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;
   c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antarmoda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;
   d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antarmoda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;
   e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, dan
   f. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah ihtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. LKIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Penyusunan LKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta Dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Dalam pembuatan LKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat yang didapat dari penyusunan suatu LKIP yaitu evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap instansinya sendiri sehingga pimpinan instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama 1 tahun anggaran.